

category: general-notes

title: "Tugas Pancasila - Kebijakan Sosial - Landasan Bansos"

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/HUK/2020

Menimbang

- Dasar
 - Undang - undang nomor 1 tahun 2020: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)^[1]
 - Sehingga diperlukan Bansos berupa sembako dan tunai
- Munculah Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19

Mengingat

1. UU No.4 Tahun 1984: Wabah Penyakit Menular^[2]
2. UU No.17 Tahun 2003: Keuangan Negara^[3]
3. UU No.1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara^[4]
4. UU No.11 Tahun 2009: Kesejahteraan Sosial^[5]
5. UU No.13 Tahun 2011: Penanganan Fakir Miskin^[6]

6. UU No.6 Tahun 2018: Kekarantinaan Kesehatan^[7]
7. Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti [Undang-Undang No.1 Tahun 2020](#)^[1-1]
8. PP No.39 Tahun 2012: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial^[8]
9. PP No.63 Tahun 2013: Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan **Pendekatan Wilayah**^[9]
10. PP No.21 Tahun 2020: Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19^[10]
11. Perpres No.46 Tahun 2015: **Kementrian Sosial**^[11]
12. Perpres No.59 Tahun 2017: Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan^[12]
13. Perpres No.16 Tahun 2018: **Pengadaan** Barang/Jasa Pemerintah^[13]
14. Perpres No.68 Tahun 2019: **Organisasi** Kementrian Negara^[14]
15. Perpres No.54 Tahun 2020: **Perubahan** *Postur* dan *Rincian Anggaran* Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020^[15]
16. Keppres No.7 Tahun 2020: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19^[16] → Kepres No.9 Tahun 2020: *Perubahan* Kepres No.7 Tahun 2020^[17]
17. Keppres No.11 Tahun 2020: Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19^[18]
18. Keppres No.12 Tahun 2020: Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19^[19]
19. Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2015: **Organisasi dan Tata Kerja Kemensos**^[20] → Peraturan Mensos No.22 Tahun 2018: Perubahan Kedua atas Peraturan Mensos No.20 Tahun 2015^[21]


Keputusan

1. Pelaksanaan *Bansos sembako dan uang tunai*
2. Diktum KESATU: *Bansos Sembako* Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal **Perlindungan dan Jaminan Sosial**
3. Diktum KESATU: *Bansos Sembako* Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal **Penanganan Fakir Miskin**
4. **Sembako:**
 1. Ibu Kota Jakarta
 2. Kabupaten Bogor, dalam (Kec.)

1. Cibinong
2. Gunung Putri
3. Klapanunggal
4. Bojong Gede
5. Jonggol
6. Cileungsi
7. Citeurup

3. Kota Depok
4. Kota Tangerang
5. Kota Tangerang Selatan
6. Kota Bekasi

5. **Uang Tunai:** Dilaksanakan diluar [wilayah tersebut](#)
6. **Petunjuk Teknis** ditetapkan oleh: *DJPJS* dan *DJPFS*
7. Penyaluran Bansos dilaksanakan dengan memperhatikan **protokol kesehatan**
8. *Pemprov* dan *Pemkab/Pemkot* menyampaikan **laporan pertanggungjawaban** penyaluran Bansos kepada Mensos melalui *DJPJS* (*Pemprov* dan *Pemkab/Pemkot* → *DPPJS* → Mensos) (tidak ada kata "*tertulis*")
9. **Laporan evaluasi tertulis** (*Pemprov* dan *Pemkab/Pemkot* → *DPPJS* serta *DPPFM* → Mensos)
10. **Data Penerima** berasal dari usulan Kepala daerah tersebut
11. **Data Penerima yang diprioritaskan**
 1. Data terpadu kesejahteraan sosial
 2. Usulan *Pemkab/Pemkot* dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
12. Pelaksanaan Bansos dibebankan pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020**
13. Keputusan Menteri Sosial ini berlaku sejak tanggal yg sudah ditetapkan (**16 April 2020**)

Status: 

Created: [2021-09-22](#)

1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020> ↗
2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.pdf> ↗
3. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU17-2003KeuanganNegara.pdf> ↗
4. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152400.pdf ↗
5. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf> ↗
6. <https://puslit.kemsos.go.id/upload/aturan/files/f5c497935cc2794803aa5f91c3f2404e.pdf> ↗
7. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018> ↗
8. <http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/PP%20Nomor%2039%20Tahun%202012.pdf> ↗
9. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5397> ↗
10. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf ↗
11. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41782/perpres-no-46-tahun-2015> ↗
12. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017> ↗
13. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018> ↗
14. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122754/perpres-no-68-tahun-2019> ↗
15. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135243/perpres-no-54-tahun-2020> ↗
16. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020> ↗
17. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134757/keppres-no-9-tahun-2020> ↗
18. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020> ↗
19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020> ↗
20. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130355/permensos-no-20-tahun-2015> ↗

21. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129979/permensos-no-22-tahun-2018> ↗